

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PELABUHAN MENJADI OBJEK WISATA PADA PELABUHAN MARINA MUARO PADANG KOTA PADANG

Fahrel Handika^{1(a)}, Fachri Adnan^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}farelhandika28@gmail.com, ^{b)}fachriadnan@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

25-08-2023

Diterbitkan Online:

30-09-2023

Kata Kunci:

Pelabuhan Marina Muaro Padang, Pembangunan, Objek Wisata

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan belum optimalnya implementasi pembangunan pelabuhan menjadi objek wisata pada Pelabuhan Marina Muaro Padang Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya sosialisasi sudah dilakukan secara berkala dan juga konsisten oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro kerjasama Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Bersama PT Pelindo II, hal tersebut dibahas melalui pertemuan yang rutin dilakukan. Sumberdaya tempat kerja relatif memadai, tetapi pada pelaksanaan kebijakan belum terlaksana dengan baik. Disposisi, dipandang berasal dari asa atau perilaku yang berasal dari pelaksana kebijakan pegawai belum pertanda suatu perilaku yang mendukung untuk mendukung implementasi kebijakan, hal ini bisa dilihat implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan terhadap Pariwisata Pelabuhan Marina Center dari segi Disposisi belum diharapkan secara optimal, maka dibutuhkan kerjasama atau gotong royong untuk mengambil sikap tegas dalam implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan terhadap Pariwisata Pelabuhan Marina Center. Pada Struktur Organisasi, ditinjau dari pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, oleh pimpinan sesuai hierarki rantai komando dalam pembinaan pegawai sudah berjalan sebagaimana mestinya. Belum adanya transparansi dan detail anggaran yang dibuat sehingga menimbulkan banyak spekulasi.

Keywords:

Muaro Padang Marina Port, Development, Attractions

Corresponding Author:

farelhandika28@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the lack of optimal implementation of port development into a tourist attraction at Muaro Padang Marina Port, Padang City. This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive method. The research location was carried out at the Tourism Office of West Sumatra Province. In determining informants, researchers use purposive sampling methods and techniques. In this study using data types, namely primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by interviews, observation, and documentation. In testing the validity of the data, researchers used method triangulation techniques. As for data analysis techniques using data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that socialization efforts have been carried out regularly and also consistently by the West Sumatra Provincial Government through the Development Cooperation Bureau of the West Sumatra Provincial Government and the West Sumatra Provincial Tourism Office, together with PT Pelindo II, this was discussed through regular meetings. Workplace resources are relatively adequate, but policy

implementation has not been well implemented. Disposition, viewed as derived from expectations or behavior derived from employee policy implementers is not a sign of a supportive behavior to support policy implementation, this can be seen the implementation of the Port Development Policy on Marina Center Port Tourism in terms of Disposition has not been expected optimally, so cooperation or mutual assistance is needed to take a firm stance in the implementation of the Port Development Policy on Port Tourism Marina Center. In the Organizational Structure, judging from the supervision carried out in stages, by the leadership according to the hierarchy of the chain of command in employee development has run as it should. The lack of transparency and detailed budgets made has led to a lot of speculation.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i3.123>

PENDAHULUAN

Wisata Pelabuhan Marina Muaro Padang merupakan salah satu tujuan wisata yang ada di Kota Padang. Pelabuhan ini dirancang khusus untuk menggabungkan sarana transportasi air sebagai tempat hiburan dan rekreasi dalam satu tempat, dimana tempat hiburan dan rekreasi di pelabuhan ini dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Tujuan wisata pelabuhan bukanlah transportasi penumpang saja, tetapi tuan rumah bagi wisatawan yang menyediakan semua jenis layanan di atas kapal dan layanan di daratan. Dalam sebuah wisata terutama wisata kapal dapat dipastikan, dimana wisata kapal akan dimulai, rutenya, lamanya perjalanan wisata tersebut dan dimana akan berakhirnya. Tur biasanya dimulai di pelabuhan dan berakhir di pelabuhan yang sama.

Wisata kapal adalah jenis wisata yang disukai oleh wisatawan yang mencari pengalaman dan petualangan yang berbeda. Penumpang memiliki kesempatan untuk mengunjungi rute tertentu (Demir, Davras, & Uzun, 2016) Kedatangan kapal dan penumpang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Beberapa dari mereka bisa langsung pembelian bahan bakar, air, pembayaran berlabuh, biaya pelabuhan. Aktivitas belanja didaratan, pembentukan UKM baru dan lainnya. Sebagian besar dampak ekonomi akan timbul dari wisatawan dan aktivitas Pelabuhan.

Pelabuhan merupakan dermaga tempat kapal-kapal berlabuh dengan segala fasilitasnya. Banyak orang yang ingin melihat dan mengetahui kapal-kapal besar, kapal perang, dan bahkan ingin menaikinya. Sementara pelabuhan dalam konsep ekonomi merupakan serangkaian kegiatan ekonomi sejak kapal datang hingga kapal berangkat. Salah satu

tujuan wisatawan adalah melihat dan mempelajari hal-hal baru. Wisatawan tentu juga ingin mencari kebahagiaan batin dengan melihat dan menikmati hal baru yang tidak ditemui di tempat tinggalnya. Itulah sebabnya, sebuah proses ekonomi pelabuhan yang berlangsung di pelabuhan bisa juga menjadi objek wisata yang cukup potensial jika dimanfaatkan dengan baik.

Implementasi UU Otonomi daerah, Kota Padang akan menyulap salah satu pelabuhan menjadi tempat pariwisata di Indonesia yaitu Pelabuhan Marina Muaro Padang. Pelabuhan Muaro Padang memiliki Sejarah mulai dari Zaman Penjajahan Belanda ,dimana dijadikan Pintu Gerbang untuk masuknya Kapal-Kapal yang akan membawa Hasil Bumi dari Daerah Sumatera Barat. Pelabuhan Marina Muara Padang akan berfungsi sebagai pelabuhan pendukung kegiatan KEK Mentawai. Adapun tranformasi kegiatan pelabuhan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Pemerintah Sumatera Barat No. HM.04.03/2/22/1HIP/UT/PI.II-17 dan no, 120-31/GSB- 2017, tentang Pengembangan Fasilitas dan Kegiatan Operasional Kepelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Muaro Padang serta dituangkan dalam RKM 2020 PT Pelindo II Sebagai Pelaksana Pembangunan Pelabuhan Marina Muaro Padang dalam pembangunan Marina Center. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Melalui Dinas Pariwisata dan PT Pelabuhan Indonesia II (persero) Cabang Teluk Bayur berencana menggali potensi yang lebih dari sebuah pelabuhan laut. Pelabuhan tidak sekedar lokasi sandar kapal dan kegiatan bongkar muat barang tetapi dapat dimanfaatkan

untuk pariwisata. Pelabuhan ini menjadi kawasan *maritim center*.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Teluk Bayur berencana melakukan transformasi kegiatan pelabuhan di Pelabuhan Muaro Padang ke bidang Pariwisata dalam bentuk Muaro Padang Heritage Tourism Concept, terdiri dari Culinary Zone, fish market, Maritim Center, Commercial Zone, Observation, Ampitheater dan lain sebagainya. Untuk tahap awal melalui kesepakatan bersama antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sepakat dalam pembangunan Pusat Informasi Maritim (Maritim Center).

Kawasan yang dibangun oleh Pelindo ini membutuhkan anggaran sekitar Rp500 miliar dengan harapan, objek wisata dapat memberikan suasana pelabuhan dan edukasi terkait pelayanan pada wisatawan. Selain diubah menjadi tempat wisata, Pelabuhan juga akan menjadi sarana penunjang pariwisata di Kota Padang karena Pelabuhan Muaro ini menjadi titik menuju sejumlah pulau, terutama Pulau Mentawai (Metrokini.com, 2020).

Pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Padang tahun 2010-2030, Pasal 21 menyatakan, Pengembangan kawasan Pariwisata di kota Padang dilakukan dalam upaya menyediakan ruangan yang melayani kegiatan wisata masyarakat kota Padang atau Turis. Pengembangan kegiatan Pariwisata dilakukan memperhatikan potensi wisata yang meliputi wisata alam, budaya, sejarah dan kuliner.

Pelabuhan Marina Muaro Padang sebagai tempat utamanya yang digunakan untuk pelabuhan kapal antar pulau Padang-Kepulauan Mentawai, saat ini sebagian besar hanya digunakan untuk hal berikut: Pelabuhan dan ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan, Ruang-ruang perkantoran dan tempat penjualan tiket, Halaman Parkir Fasilitas lain seperti dagang usaha mikro/warung dan penyimpanan jetski. Pelabuhan Marina Muaro Padang belum mampu menarik wisatawan berkunjung untuk berwisata (AntaraSumbar, 2018). Hal ini juga dapat dilihat dari data dan Informasi dari Staf kehumasan PT Pelindo II, Luffy mengatakan bahwa pengunjung dan pengguna lokasi saat ini kebanyakan di domimasi oleh calon penumpang dan penumpang kapal bersama keluarganya konsumen warung dan para pegiat sport jet ski.

Masih kurangnya wahana edukasi seputar dunia kemaritiman di Sumatera Barat mengakibatkan kurangnya pemahaman cara menjaga kelestarian alam lautan sebagai perwujudan tanggung jawab warga negara pada lingkungan Maritim (Sumberprov.go.id, 2022).

Selain itu, Pembangunan pelabuhan Marina Muara Padang (Maritim Center) yang berkaitan dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepulauan Mentawai. Dimana, pelabuhan Marina Muara Padang sebagai pelabuhan pendukung kegiatan KEK Mentawai karena dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi dan Kota Padang dari Pelabuhan Marina Muara Padang menuju ke KEK Mentawai (Lintasmedianews, 2020).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada Selasa, 1 November 2022 rencana pembangunan yang dimulai dan ditetapkan pembangunan Pelabuhan Marina Center Muaro Padang pada tahun 2020 mengalami hambatan dalam proses pembangunan berkelanjutan hal ini terlihat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memutuskan lokasi untuk memindahkan nelayan tonda yang berada di Batang Arau Muaro Padang. Pindahan nelayan tonda ini bagian dari bentuk kesiapan pemerintah untuk mengubah Muaro Padang menjadi Marina Center Padang. Pindahan pun tentu perlu dilakukan sebelum pengerjaan dilakukan (Bisnis.com, 2020).

Hal lain peneliti juga menemukan banyak tumpukan sampah disekitaran lingkungan Pelabuhan Marina Center Muaro Padang tentu hal ini dibutuhkan upaya serius dari Pemerintah Provinsi maupun Kota dalam pengelolaan sampah di pelabuhan Marina Muaro Padang. Kepala Dinas dan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Yosmeri Mengatakan, untuk menjadikan Marina, tidak hanya soal pembenahan dari sisi infrastruktur pelabuhan saja tapi juga soal kebersihan lingkungan (Cendana News.com, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Pembangunan Pelabuhan Marina Muaro Padang Menjadi Objek Wisata

Hasil implementasi kebijakan pembangunan pelabuhan Marina Muaro Padang menjadi objek wisata menunjukkan bahwa:

a) Komunikasi

Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan terhadap Pariwisata Pelabuhan Marina Center dalam upaya untuk selalu mengontrol kelancaran Pembangunan Pelabuhan Marina Center, upaya sosialisasi sudah dilakukan secara berkala dan juga konsisten oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Kota Padang, Bersama PT Pelindo II, hal tersebut dibahas melalui pertemuan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini sesuai Edward III dalam Akib (2010:5), Komunikasi: diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Indikator yang dioperasionalkan dari dimensi komunikasi adalah teknik komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kebijakan yang akan diimplementasikan, agar komunikan memahami, menyadari dan selanjutnya memberikan respon positif atau melakukan respon untuk menerapkan pesan kebijakan yang disampaikan dengan sebaik-baiknya.

b) Sumber daya

Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan terhadap Pariwisata Pelabuhan Marina Center dari segi sumber daya manusia sudah cukup baik dari sisi pendidikan, hal ini bisa dilihat dari adanya peningkatan pengetahuan dan juga pendidikan sehingga Kebijakan bisa berjalan konsisten dan juga adanya pembinaan pendidikan yang berkala sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pegawai. Hal ini sesuai dengan Edward III dalam Akib (2010:5), sumberdaya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumberdaya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik (imangible).

c) Disposisi

Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan terhadap Pariwisata Pelabuhan Marina Center dari segi Disposisi belum diharapkan secara optimal, maka dibutuhkan kerjasama atau gotong royong untuk mengambil sikap tegas dalam implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan terhadap Pariwisata Pelabuhan Marina Center. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III dalam Akib (2010:5) dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Aspek disposisi yang perlu digali dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap perilaku dari pelaksana kebijakan (implementor).

d) Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek semacam struktur organisasi, pembagian kewenangan, ikatan antara unit-unit organisasi serta sebagainya. Dari hasil dilapangan diperoleh informasi kalau pengawasan menempel secara berjenjang yang dicoba oleh pimpinan cocok hierarki rantai komando buat pembinaan pegawai sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III dalam Akib (2010:5), struktur birokrasi merupakan penentuan bagaimana pekerjaan dibagi dan dikelompokkan secara formal. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pembangunan Pelabuhan Marina Muaro Padang Menjadi Objek Wisata di Kota Padang

Implementasi kebijakan pembangunan pelabuhan Marina Muaro Padang menjadi objek wisata di Kota Padang adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Kebijakan ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dan memperkaya daya tarik wisata kota, namun terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Pembangunan Pelabuhan Marina Muaro Padang Menjadi Objek Wisata di Kota Padang yaitu:

Faktor Pendukung

a) Isi kebijakan

Dalam implementasi kebijakan pelabuhan Marina Muaro Padang Menjadi Objek Wisata di Kota Padang dalam isi kebijakan adanya ketetapan tujuan dan peningkatan ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Selain itu, pengawasan ketat terhadap pembangunan infrastruktur di sekitar pelabuhan, pengelolaan limbah secara efektif, dan upaya konservasi untuk melindungi flora dan fauna lokal. Hal ini sesuai dengan Bambang Suggono bahwa Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b) Pembagian Potensi

Pembangunan marina Muaro Padang Menjadi Objek Wisata akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengembangan Pelabuhan Marina Muaro Padang sebagai objek wisata bukan hanya tentang mendatangkan wisatawan, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan Bambang Suggono bahwa gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.

Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas sehingga tidak mampu membedakan program yang memiliki potensi baik dan tidak memiliki potensi baik. Pembagian potensi dalam implementasi merujuk pada identifikasi berbagai faktor atau

aspek yang memiliki potensi untuk memengaruhi hasil dari suatu kebijakan, proyek, atau inisiatif. Dalam hal ini implementasi adanya beberapa pembagian potensi yang dilakukan.

Faktor Penghambat

a) Informasi

Dalam implementasi kebijakan Pembangunan Pelabuhan Marina Muaro Padang Menjadi Objek Wisata di Kota Padang banyak masyarakat dan nelayan tidak memahami tujuan transformasi Pelabuhan Marina Muaro Padang menjadi objek wisata. Sehingga masyarakat dan nelayan tidak mengetahui dengan pasti adanya pembangunan ini. Implementasi kebijakan publik menurut Bambang Suggoo mengatakan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. Penyampaian informasi yang efektif dalam implementasi kebijakan, proyek, sangat penting untuk memastikan semua pihak terlibat memahami tujuan, langkah-langkah, tanggung jawab, dan harapan yang terkait dengan implementasi tersebut.

b) Dukungan

Dalam implementasi kebijakan Pembangunan Pelabuhan Marina Muaro Padang Menjadi Objek Wisata di Kota Padang masih kurangnya dukungan dari masyarakat dan nelayan. Hal ini akan memberikan dampak kepada masyarakat dan nelayan. selain itu, masyarakat dan nelayan mendengar kabar-kabar dari mulut ke mulut, tetapi tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana rencana ini akan berdampak pada mata pencaharian masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Bambang Suggono yang mengatakan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Penyampaian dukungan dalam implementasi kebijakan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan dengan lancar dan efektif.

PENUTUP

Merujuk berdasarkan uraian diatas, dimana penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti,

maka di simpulkan: Implementasi kebijakan pembangunan pelabuhan Marina Muaro Padang Menjadi Objek Wisata di Kota Padang sudah terimplementasi dengan baik. Akan tetapi terdapatnya kendala tentang relokasi nelayan yang terdampak kebijakan pembangunan. Selain itu masih belum adanya sarana edukasi tentang pentingnya tujuan, manfaat dan fungsi dari kemaritiman Sumatera Barat. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pembangunan Pelabuhan Marina Muaro Padang Menjadi Objek Wisata di Kota Padang terdiri dari 2 yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk faktor pendukung yaitu adanya isi kebijakan dan pembagian potensi. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu kurangnya informasi serta dukungan dari masyarakat dan nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwa.
- Sore, Uddin B dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta:Putra Grafika.
- Demir, Ş. Ş., Davras, G. M., & Uzun H. (2016). *The role of port operations in the development of cruise tourism: The case of port of Antalya*. Journal of Human Sciences, 13(3), 5613-5622. doi:10.14687/jhs.v13i3.4267.
- Hanief, Shofwan dan Dian Pramana. 2018. *Pengembangan Bisnis Pariwisata Dengan Media Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- İzmir Chamber of Commerce. (2016). İZTO, (<http://www.izto.org.tr/tr/izmirdekruvaziyer-turizmi>) (Date of access: 30.03.2016.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lekakou, M. B., Pallis, A. A., Vaggelas, G. K. (2009). Which Homeport In Europe: The Cruise Industry's Selection Criteria, *Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism*, 4(4), p.p. 215-240.
- M. Ismail. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya : Universitas Hang Tuah.
- Mulyadi, Dedi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, Mohammad. 2012. *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Softmedia.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik; Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpulis.
- Suntoro, Irawan dan Hasan H. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- <https://www.metrokini.com/2020/01/10/maritim-center-dibangun-nelayan-muaro-padang-diminta-pindah-ke-bungus/> di akses 20 Februari 2022.
- <http://www.lintasmedianews.com/2020/08/wagub-sumbar-pelabuhan-marina-center.html> di akses 20 Februari 2022